



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Soekarno – Hatta Nomor 466 Telepon : (022) 7513586
Faksimil : (022) 7503664 website : www.bpmpd.jabarprov.go.id email : bpmpd@jabarprov.go.id
Bandung-40266

**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI JAWA BARAT**

- TUGAS** : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- FUNGSI** : a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Penyelenggaraan kesekretariatan, pemerintahan desa/kelurahan, penguatan kelembagaan dan partisipasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTB.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, Kehidupan Sosial Budaya dan Pengembangan Partisipasi serta Keswadayaan Masyarakat	1. Persentase desa yang lembaga kemasyarakatanny a berperan aktif	Berdasarkan persentase LPM, PKK, Karang Taruna, RW/RT, Posyandu yang berperan aktif	Desa, Kab/Kota	Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
		2. Persentase Desa yang melaksanakan Gotong Royong	Berdasarkan persentase dari desa/kelurahan yang memiliki perdes tentang Gotong Royong, desa/kelurahan yang melaksanakan gotong royong, desa/kel yang memiliki pencatatan administrasi	Desa, Kab/Kota	Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
		3. Persentase Desa/Kelurahan yang peran serta masyarakatnya baik dalam pembangunan	Berdasarkan persentase keterlibatan masyarakat dalam memberikan ide dan gagasan pembangunan, pelaksanaan	Desa, Kab/Kota	Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

			pembangunan, pemantauan pelaksanaan pembangunan.		
		4. Persentase Desa yang keswadayaannya meningkat sesuai target	Berdasarkan persentase kontribusi masyarakat dan pembangunan, desa/kel yang memiliki pencatatan administrasi keswadayaan masyarakat	Desa, Kab/Kota	Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap Sumber Ekonomi	1. Persentase Desa yang telah mengakses permodalan usaha.	Berdasarkan persentase: telah berdiri permodalan usaha melalui BUMDES, permodalan melalui lembaga keuangan formal lain (koperasi/BMT, dll) terdapat bantuan penguatan permodalan dari pemerintah atau pihak lain.	Desa, Kab	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
		2. Persentase Desa yang telah mengakses pemasaran	Berdasarkan persentase: terdapat aktifitas produksi dengan hasil berupa barang/jasa yang dipasarkan keluar desa, terdapat pasar desa, terdapat lembaga formal yang menampung hasil produksi masyarakat.	Desa, Kab	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. Persentase desa/kecamatan yang telah memiliki wartek/posyantek	Berdasarkan persentase wartek: alat yang digunakan masih produktif, alat yang masih produktif bisa dikembangkan, sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan alat, bahan baku yang akan di produksi sesuai dengan	Desa, Kec, Kab	Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

			potensi SDA desa; Posyantek yang berperan aktif, posyantek yang aktif dalam mitra kerja dengan pengusaha, instansi, PT, LIPI, SMK; posyantek yang aktif dalam pengadaan pelatihan dan bimbingan; posyantek yang aktif dalam koordinasi dengan pokjanal posyantek.		
		2. Persentase Desa yang telah memanfaatkan SDA berwawasan Lingkungan	Persentase desa yang telah memanfaatkan SDA berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna.	Desa, Kab	Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
4.	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan	1. Persentase Desa yang aparaturnya memiliki kompetensi sesuai standar	Berdasarkan persentase: aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan perencanaan pembangunan desa, aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawaban, jumlah pegawai yang memiliki keterampilan computer.	Desa, Kab	Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan
		2. Persentase Desa yang memiliki Kantor Desa di atas Tanah Kas Desa	Berdasarkan persentase bangunan kantor diatas tanah kas desa, kelengkapan penunjang kantor desa dalam teknologi, kelengkapan mobilitas penunjang kantor desa.	Desa, Kab	Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan
		3. Persentase Desa yang lebih dari 50% APBDes digunakan untuk pembiayaan	Berdasarkan persentase penganggaran pembangunan desa lebih dari 50%	Desa, Kab	Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan

		pembangunan	dianggarkan di APBDes, realisasi APBDes untuk pembangunan desa lebih dari 50%.		
5.	Meningkatnya Infrastruktur Perdesaan	Persentase Desa yang memiliki Infrastruktur sudah baik.	Berdasarkan persentase terdapatnya jalan desa yang sudah beraspal, terdapatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan jalan desa, jalan lingkungan, tembok penahan tanah (TPT), drainase desa, irigasi desa, pasar desa, jembatan desa, rehab/renovasi kantor desa.	Desa, Kab	Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan

Bandung, 2016

KEPALA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI JAWA BARAT

KOESMAYADIE
Pembina Utama Madya
NIP. 19590920 198303 1 013